

**EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DENGAN MODEL CIPP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH**

Muhammad Ryas

FansuriNPP. 30.0031

*Asdaf Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh*

*Prodi Keuangan Publik*

Email : muhammadryasfansuri@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Jatnika Dwi Asri,  
SE, M.Si, M.Ak

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Utilization of the Regional Government Information System (SIPD) facilitates the government in achieving a transparent, accountable, effective and efficient governance system in regional financial management so as to create good governance. SIPD still has problems that must be resolved and repaired immediately, namely that there are still problems related to SIPD, one of which is human resources that are not optimal and some features cannot be operated in the application. **Purpose:** The aim of the research is to find out how SIPD is used in Central Aceh District and to find out what are the obstacles to its use. **Method:** The method used is qualitative research with descriptive research methods and an inductive approach. Data collection techniques consist of interviews, observation and documentation as well as viewing documents directly. **Result:** The results of the research show that the Utilization of the Local Government Information System (SIPD) in Central Aceh District has generally been going well. In its use, there are a number of things that become obstacles related to this SIPD, such as the existence of Human Resources (HR) who still understand the application, and the application features that are still incomplete and the difficulty in complaining if there is a revision. **Conclusion:** The use of SIPD in Central Aceh District is in accordance with the procedures implemented but there are still some obstacles so that the Central Aceh District Government is expected to further increase training and technical guidance activities for each Regional Apparatus Organization (OPD) and Subdistrict, make related Standard Operating Procedures (SOP) SIPD and propose to the Ministry of Home Affairs to provide SIPD admins in each region, at least in each province.

*Keywords: Evaluation, SIPD, CIPP Model, Good Governance*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memudahkan pemerintah dalam mencapai sistem pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). SIPD masih memiliki permasalahan yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki yaitu masih terjadi terkait SIPD salah satunya sumber daya manusia yang belum optimal dan sebagian fitur yang belum bisa dioperasikan dalam aplikasi tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPD yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada pemanfaatannya. **Metode:** Metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta melihat dokumen langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Pada pemanfaatannya ada beberapa hal yang menjadi kendala terkait SIPD ini seperti adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih paham tentang aplikasi tersebut, dan fitur aplikasi yang masih belum lengkap serta sulitnya dalam mengkomplain bila ada revisi. **Kesimpulan:** Pemanfaatan SIPD di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai prosedur yang diterapkan namun masih ada beberapa kendala sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk meningkatkan lagi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD serta mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri menyediakan admin SIPD di tiap-tiap daerah minimal ada pada tiap provinsi.

Kata Kunci : Evaluasi, SIPD, Model CIPP, *Good Governance*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menjelaskan pada BAB XXII tentang informasi Pemerintah Daerah Pasal 391 ayat (1) huruf b bahwa: “Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah”. Dimana sistem informasi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada Bab XIII pasal 214 ayat (1) bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi keuangan daerah. Salah satu bentuk penggunaan sistem oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dimana SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka pemerintah akan lebih mudah dalam mencapai sistem pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*. SIPD merupakan sistem yang mengintegrasikan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengendalian sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat.

Kebutuhan akan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ini muncul karena penyimpangan dalam pelaksanaan demokratisasi untuk mendorong kewarganegaraan menciptakan sistem atau paradigma baru mengawasi jalannya pemerintahan untuk menghindari menyimpang dari tujuan awal. Salah satu asas umum penyelenggaraan pemerintahan adalah keterbukaan, asas keterbukaan yang dimaksud adalah yang transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat luas (Wasistiono:2003).

*Good governance* memiliki unsur utama yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan aturan hukum. *Good governance* menurut Kooiman (1993) berarti merupakan sekelompok kegiatan interaksi sosial politik yaitu antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Kashi Nisjar:1997 dalam Domai 2001).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan (Moenek dan Suwanda:2019). Tujuan dari *good governance* adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dalam upaya tersebut maka dari itu pemerintah daerah

dengan ini harus melibatkan masyarakat yaitu dengan turut ikut memberi aspirasi kepada pemerintah daerah , membuka suara terhadap pemerintah sebagai suatu pertimbangan pemerintah agar bisa mengambil keputusan yang efektif , menyusun program kegiatan selama satu tahun yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemanfaatan SIPD sangat berpengaruh dalam penyusunan APBD dimulai dari perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban.

Bupati Aceh tengah melalui kepala badan pengelolaan keuangan kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa pada tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh Tengah harus sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti contohnya dalam pembahasan Standar Biaya Umum di Aceh Tengah. Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah awal tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Aceh Tengah tahun 2021 sudah diinput dalam SIPD (Diskominfo Aceh Tengah:2019). Kepala perwakilan BPKP aceh juga telah melakukan kunjungan kerja dan koordinasi kerja sam peningkatan pengawasan tata kelola pemerintahan, dimana kerjasama ini adalah membahas antara lain tentang penatausahaan *Financial Management Information System* (FMIS) yaitu dilaksanakan serentak atau simultan dengan menggunakan SIPD.

Meskipun pemerintah Aceh Tengah sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah di Aceh Tengah, yakni memudahkan dalam kecepatan proses transaksi, penginputan data, efisien dalam waktu dan biaya, tepat dalam perhitungan, serta transparansi anggaran. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang alami oleh pemerintah dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan membahas tentang evaluasi pemanfaatan SIPD sehingga menciptakan *good governance* di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process dan Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985).

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Meskipun pemerintah Aceh Tengah sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah di Aceh Tengah, yakni memudahkan dalam kecepatan proses transaksi , penginputan data, efisien dalam waktu dan biaya, tepat dalam perhitungan, serta transparansi anggaran. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang alami oleh pemerintah dalam penerapannya, yaitu seperti penerapan sistem tersebut di pemerintahan Aceh Tengah terdapat kendala terkait kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam keahlian dibidang keuangan dan teknologi informasi serta masih kurangnya fitur dan kesesuaian yang ada pada aplikasi SIPD sehingga pegawai masih bekerja secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel atau file kerja, mereka masih memerlukan pelatihan sosialisasi dan khusus terhadap pengguna SIPD.

Dalam menciptakan *good governance* maka dengan ini pengembangan SIPD harus didasari akan kebutuhan masyarakat, adanya regulasi, kepemimpinan, dan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pemeliharaan aplikasi SIPD ini juga membutuhkan anggaran yang lumayan mahal, sehingga kemampuan Anggaran sangat dibutuhkan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya SIPD. Permasalahan tersebut bisa diminimalisir dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu memproses sistem pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, karena di dalam penyelenggaraannya pemerintahan daerah ada salah satu unsur dimana bila sistem pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik maka itu adalah salah satu wujud keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks

pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun mengenai *good governance*. Pertama, Penelitian Maulana Yusuf, 2016. Pengaruh SIPKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . Penelitian ini Mengkaji tentang Implementasi SIPKD Provinsi Jawa Barat mampu menangani konsolidasi data sehingga data dapat terintegrasi dengan baik. Kedua, Penelitian Nur Fadhilla Rachmadani, 2019. Implementasi *good governance* di dalam badan pengelolaan keuangan di Denpasar. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam di BPKAD Kota Denpasar telah diwujudkan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan SIPKD. Ketiga, Penelitian Iqbal Rafiqi, 2021. Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan *Good Governance* dengan Model CIPP. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi *e-Budgeting* pada Pemerintah kota Surabaya telah mencapai sasaran, yaitu untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Keempat, Penelitian Nila Cahyati, 2021. Apakah Integrasi SIPD Mempengaruhi Penerapan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah . Penelitian ini Menganalisis dan mengamati pengintegrasian tata kelola sistem informasi keuangan dalam SIPD mendukung penerapan tata kelola yang baik di BPKAD Pemerintah Kota Malang. Kelima, Penelitian Muhammad Zaky Harahap, 2022. Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance* di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan belum maksimalnya dalam pengoperasian SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokus penelitian yang dimana penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Aceh Tengah. Pada penelitian ini Mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta kendala dalam pemanfaatannya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPD yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada pemanfaatannya.

## **II. METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Menurut Koentjaraningrat (1993: 89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah “Desain penelitian yang memiliki tiga format yaitu penelitian deskriptif, verifikasi dan format.” Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan deskripsi lainnya secara keseluruhan dan dalam kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami, menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong 2017:6) .

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan yang terdiri dari Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun cara menganalisis data yaitu dengan Analisis data kualitatif menurut Seiddel (1998) prosesnya berjalan dengan cara menulis yang menghasilkan catatan lapangan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, memilah-milah, mensintesis, membuat indeksnya dan membuat ikhtisar, serta berpikir, dengan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari serta menemukan pola dan hubungan-hubungan, juga membuat temuan-

temuan umum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

Sebelum adanya SIPD, Proses sistem yang telah di implementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu memiliki sistem yang sudah diterapkan oleh Pemda yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana SIMDA adalah suatu aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencakup aplikasi utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Pada tahun 2020 pemerintah sudah mewajibkan seluruh daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memudahkan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Tata cara peneliti melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu dengan menghubungkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan menggunakan Konsep Model Evaluasi Stufflebeam (2003). Konsep model evaluasi ini memiliki tujuan penting yaitu evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Berikut merupakan penjabaran dimensi evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan Model *Context, Input, Proses, dan Product* (CIPP) yang dikemukakan oleh Stufflebeam.

##### a. Evaluasi Konteks

##### 1. Konteks Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah Pada Pemanfaatan SIPD

Mengacu pada tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan bidang keuangan daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK) Kabupaten Aceh Tengah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Tengah harus disusun setiap tahun anggaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan. Oleh karena itu, salah satu sistem untuk mempermudah hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggunakan SIPD.

Pemerintah Kabupaten Aceh tengah sudah mendapatkan hasil yang baik terkait dengan pelaporan keuangan serta dari hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berhasil meraih penghargaan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya suatu pelaporan yang akurat serta realisasi anggaran yang tepat salah satunya dengan bantuan aplikasi SIPD, pemerintah dapat dengan mudah dan lancar dalam penginputan setiap proses pengelolaan keuangan.

##### 2. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tantangan dan Peluang Yang berkaitan dengan SIPD

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempunyai kekuatan dan kelemahan internal dalam pengimplementasi penggunaan sistem tersebut.

Kekuatan internal:

1. Komposisi aparatur dari segi jumlah, latar belakang pendidikan dan kepangkatan.
2. SOP Pengelolaan keuangan.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Kelemahan internal:

1. Kemampuan teknis aparatur belum merata

2. Budaya, etos kerja dan komitmen pengelolaan keuangan individu belum optimal.

### **3. Target Serta Tujuan Didalam Pemanfaatan SIPD Yang Lebih Optimal**

Tujuan utama pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk tujuan transparansi. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah tujuan mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini secara umum sudah memenuhi. Target utama pemanfaatan aplikasi ini adalah memudahkan untuk melaksanakan siklus keuangan dari mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan terbuka dan transparan sehingga menjadikan tata kelola pemerintah yang baik.

## **b. Evaluasi Input**

### **1. Mengidentifikasi dan Menilai Kemampuan Sistem**

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelola keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Tambunan 2016: 552).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu aplikasi yang sangat berguna bagi pemerintah daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) keuangan daerah dapat berjalan secara efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable sehingga terbentuknya asas-asas pemerintah daerah yang baik. Sistem Pemerintah Daerah (SIPD) mempunyai prinsip dasar seperti kejelasan peranan dan pertanggungjawaban fiskal, Ketersediaan informasi dapat di rasakan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan keterbukaan dalam perencanaan.

### **2. Alternatif Strategi Program Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Dana dan Anggaran**

Adapun faktor-faktor dalam evaluasi Input di dalam Stufflebeam adalah SDM, Sarana dan prasarana pendukung, dana dan anggaran serta langsung melihat programnya.

#### **- Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam pemanfaatan aplikasi SIPD di Kabupaten Aceh Tengah belum seluruhnya paham dan mahir di dalam pengoperasiannya. Pegawai di setiap OPD dan Kecamatan harus banyak belajar serta mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengoperasian SIPD. Jalannya suatu program harus disertai dengan SDM yang mahir di bidangnya.

#### **- Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan dalam setiap OPD. Sarana dan Prasarana juga sangat mempengaruhi dalam tugas dan tanggung jawab pegawai atau sumber daya manusia, karena dengan menggunakan sarana dan prasarana pegawai bisa dengan mudah mengakses suatu pekerjaan salah satunya yaitu SIPD. Dengan mudahnya SIPD di akses maka akan mempengaruhi terhadap hasil inputan serta pelaporan keuangan yang memadai dan baik.

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kabupaten Aceh Tengah terlihat sudah memadai dan mencukupi untuk pemanfaatannya di dalam pengoperasian SIPD. BPKK Aceh Tengah memiliki 18 unit laptop dan 63 unit komputer PC, ini membuktikan bahwa untuk sarana dan prasarana dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah dikatakan baik.

#### **- Dana dan Anggaran**

Faktor penting lain dalam pemanfaatan SIPD ini adalah dana dan anggaran, dalam penggunaan SIPD dalam hal anggaran sudah cukup memadai serta di Kabupaten Aceh Tengah sudah seluruhnya OPD wajib menggunakan aplikasi tersebut.

- Observasi dan melihat langsung

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat magang di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah, bahwa kebijakan organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tidak ada kebijakan baik dari Peraturan Daerah, maupun Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tengah saling berinteraksi dengan perangkat daerah lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, dan secara bersama-sama mengelola perencanaan dan keuangan daerah.

**c. Evaluasi Proses**

**1. Memonitor potensi hambatan prosedural diprogramkan**

Hambatan prosedural terkait SIPD salah satunya adalah pada penatausahaan yang masih sering error. Selain penatausahaan SIPD juga sering mengalami error kemungkinan dikarenakan jaringan dan faktor lainnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga menggunakan SIMDA dan FMIS sebagai pembantu dalam penginputan keuangan yang dipegang oleh BPKP Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga masih menggunakan SIMDA terkait penginputan keuangan, dimana SIMDA berguna untuk menyelaraskan penginputan yang berada di bawah naungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Alasan SIMDA masih digunakan dikarenakan tidak semua fitur SIPD bisa digunakan dengan maksimal sehingga penggunaan aplikasi SIMDA juga masih berjalan dalam pelaksanaannya.

**2. Mendeskripsikan proses yang sebenarnya, dan berinteraksi dengan staf.**

Secara umum pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah telah mengetahui makna SIPD keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian, manfaat dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. Salah satunya yaitu pengoperasian SIPD pada tahap akuntansi yaitu memudahkan pada penginputan seluruh anggaran yang tersedia dan yang dicairkan. Hal tersebut tentunya memperkuat pemahaman mereka dalam memanfaatkan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) keuangan.

Pada tahun 2023, Kemendagri telah menerbitkan SIPD terbaru yaitu di launching pada bulan Desember 2022, dimana SIPD diubah menjadi SIPD RI, sehingga dalam penginputan untuk rencana anggaran 2023/2024 sudah menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD RI. Salah satu pemanfaatan SIPD ini adalah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dimana sudah bisa diinput dengan mudah dalam aplikasi SIPD, sehingga pegawai tidak lagi menggunakan Excel serta membuat tabel lagi pada saat ingin membuat lembaran KUA dan PPAS, tetapi pegawai bisa dengan mudah tinggal menginput dalam aplikasi dan aplikasi langsung otomatis mengeluarkan tabel yang sesuai dengan apa yang diinput sebelumnya.

**d. Evaluasi Produk**

Tujuan utama dari pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu agar terciptanya transparansi pengelolaan keuangan serta mempermudah dalam penginputan serta terintegrasi dari pusat kepada setiap pemerintah daerah khususnya dalam siklus tahap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban.

Peluang serta tantangan yang dihadapi khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah yang harus segera dilaksanakan sehingga terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan yaitu yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu sendiri. Segala kendala dan hambatan yang sering terjadi pada pemanfaatan SIPD khususnya pada pengelolaan keuangan ini sudah seharusnya untuk dilakukan perubahan atau inovasi-inovasi yang mendasar terhadap keefektifan pengelolaan keuangan. Segala proses yang dilakukan dalam pengoperasian SIPD tentunya harus didukung dengan matangnya persiapan seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Dana yang diperlukan oleh organisasi.

### **3.2 Hambatan serta kendala dari pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance***

Adapun kendala serta hambatan yang ada pada pemanfaatan SIPD di Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

#### **1. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Bahwa penerapan suatu kebijakan salah satunya penerapan SIPD ini masih ada kendala terkait dengan Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan dengan masih banyak pegawai atau admin yang masih terhambat terkait tata cara serta pengoperasiannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah harus menyelesaikan permasalahan ini khususnya di bidang SDM.

#### **2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD.**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), selama ini hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tidak ada kebijakan baik dari Peraturan Daerah, maupun Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

#### **3. Keterlambatan perbaikan dari pusat.**

Kendala dalam pemanfaatan SIPD salah satunya yaitu keterlambatan respon dari pusat atau admin SIPD bila ada revisi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selain menggunakan SIPD dan SIMDA juga akan menyelaraskan penggunaan aplikasi Financial Management Information System (FMIS) yang berpusat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh untuk mempermudah dalam penginputan pengelolaan keuangan daerah.

Dari kendala-kendala di atas maka masih ada kekurangan dalam pemanfaatan SIPD di Kabupaten Aceh Tengah, dimana kekurangan tersebut sangatlah diharapkan untuk di perbaiki kedepannya. Sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* kendala-kendala tersebut mempengaruhi baik atau tidaknya tata pemerintahan di suatu daerah.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah diterapkan di Kabupaten Aceh Tengah khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sudah terhubung antara satu sama lain di setiap OPD maupun terhubung ke pusat sehingga saling terintegrasi dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Sama halnya dengan temuan Maulana Yusuf yaitu sistem berbasis elektronik yang diterapkan di Biro Kepegawaian Daerah Jawa Barat ini mampu menghubungkan dan mengolah integrasi data sehingga data pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan baik serta sistem tersebut menghasilkan informasi yang akurat (Maulana Yusuf, 2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat berguna dalam penyusunan dan penginputan dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerah, dimana mulai dari tahap perencanaan SIPD membantu dalam menginput data serta mengolah data yang bisa menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat sehingga mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), namun masih ditemukan kendala dalam fitur aplikasi tersebut



yang belum sepenuhnya bisa terpakai sehingga menghambat dalam kelola keuangan yang baik. Berbeda dengan penelitian Nur Fadhilla Rachmadani terkait penerapan tata kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar memiliki prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan Misinya, yang terbentuk dari partisipasi masyarakat dengan penyelenggaraan Musrenbangda dalam pengelolaan keuangan, terdapat keterbukaan pengelolaan keuangan berdasarkan SIPKD, adanya pertanggungjawaban keuangan berupa penyusunan Laporan Keuangan (LK) bertanggung jawab kepada BPK, dan adanya keadilan anggaran dimana Alokasi APBD merata di seluruh wilayah Kota Denpasar (Nur Fadhilla Rachmadani, 2019)

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Aceh Tengah masih ditemukan kendala seperti kurangnya fitur dalam aplikasi tersebut sehingga pemerintah daerah juga masih menggunakan aplikasi yang lama seperti SIMDA dan FMIS untuk membantu aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan temuan penelitian Iqbal Rafiqi terkait implementasi e-Budgeting Pemerintah kota Surabaya telah mencapai target, yakni diantaranya untuk mewujudkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam siklus perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (ABPD) serta memperkuat sistem sebelumnya, yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sesuai dengan penelitian Iqbal Rafiqi (Iqbal Rafiqi, 2021)

Masih terdapat kendala dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu kurangnya sumber daya manusia, masih terdapat fitur SIPD yang belum bisa dipakai sepenuhnya serta sulitnya dalam hal revisi anggaran yang sudah di input dalam aplikasi tersebut. Sama halnya dg temuan penelitian sebelumnya bahwa tentang penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan belum maksimalnya dalam pengoperasian SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah (Muhammad Zaky, 2022).

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan kendala yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah bahwa dalam penggunaan SIPD bila melakukan revisi anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terlambat serta harus mengirim surat kepada admin pusat yang otomatis bendahara dan pptk kewalahan bila ada revisi dari OPD sehingga penginputan keuangan terhambat dan harus menunggu dari admin pusat yang biasanya akan mengirim respon sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah umumnya sudah berjalan sesuai prosedur. Namun, pada pelaksanaannya masih ada kendala yang terdapat pada dimensi proses sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga menggunakan aplikasi SIMDA dan FMIS dalam pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan daerah.
2. Kendala yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga masih harus di perbaiki kedepannya yaitu seperti:
  - a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang atau belum paham tentang aplikasi.
  - b. Sebagian sistem pada aplikasi SIPD masih sering error

- c. Keterlambatan respon dari Kemendagri bila ada komplain terhadap revisi anggaran pada suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses mengumpulkan data dan melaksanakan observasi dengan maksimal dan memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diberikan penulis kepada informan dari Penelitian ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada penulis yang tentunya penulis dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Cahyati, N., dan Mukhlis Imam., (2021). *Does Integration Of Information System Technology Influence Good Governance Implementation In Public Service In Regional Government?. International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation.* Halaman 28-42.

Fadhilla, Nur, R. Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Denpasar. Jurnal. Halaman 1-17

Kashi Nisjar S. Ak. MM. 1997. "Beberapa Catatan tentang *Good Governance*". Dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.

Koentjaraningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia.

Maulana Yusuf, Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Jurnal, 2016

Marja Sinurat.2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Ghalia Indonesia

Moeleong, L.J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Rosda.

Muhammad Zaky Harahap, 2022. Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance* di Kota Medan provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rafiqi, Iqbal. Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan *Good Governance* dengan

Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). Journal Of Islamic Economic Business. Halaman 115-138.

Stufflebeam, Daniel L. 2002. "The CIPP Model For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), *Evaluation in Education and Human Service*, Boston: Kluwer Academic Publisher.

Tambunan, D. R., & Hardiawan, R. K. (2016). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Melalui Implementasi Simda. Tesis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung : CV Fokusmedia.

Widoyoko, Eko Putro. 2012. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta : Pustaka Belajar

